

**MEDIA MASSA, OLAH RAGA DAN POLITIK
DALAM PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA U-20 2023**

(Analisa Wacana Kritis Pernyataan Penolakan Israel oleh Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali Pada Pemberitaan Media Daring Kompas.id Periode Maret 2023)

Nico Erdi Purwanto, Meistra Budiasa, Franky P. Roring
Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bung Karno
Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno

nicoepurwanto@gmail.com

meistra@gmail.com

frankypst77@gmail.com

Abstract

The hosting of the 2023 FIFA U-20 World Cup in Indonesia was abruptly canceled by FIFA. FIFA revoked Indonesia's host status due to the growing discourse of rejecting the presence of the Israeli national team in Indonesia ahead of the event. The rejection was also supported by statements from the Governor of Central Java, Ganjar Pranowo, and the Governor of Bali, I Wayan Koster. According to both figures, the rejection of the Israeli national team is based on the mandate of Indonesia's constitution, which opposes all forms of colonialism, including Israel's occupation of Palestine. The discourse gained momentum as it was widely disseminated in the media. This research adopts Norman Fairclough's critical discourse analysis and employs qualitative research methods with a literature review of Kompas.id news during the period of March 2023. The research findings indicate that the hosting of the 2023 FIFA U-20 World Cup involves political elements within the discourse of rejecting the Israeli national team. There are three main findings: the constitution being cited as the reason for rejection, politics intervening in the domain of sports, and the media constructing the narrative in sports reporting. Kompas.id argues that these are two distinct domains that should not be mixed together.

Keywords: Sports and politics, Critical Discourse Analysis, World Cup U-20, Rejection of Israel

Abstrak

Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia dibatalkan mendadak oleh FIFA. FIFA mencabut status tuan rumah dari Indonesia karena wacana penolakan timnas Israel hadir di Indonesia yang menguat menjelang pelaksanaan ajang itu. Penolakan juga datang dari pernyataan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan gubernur Bali, I Wayan Koster. Oleh kedua tokoh itu, alasan penolakan timnas Israel adalah berdasarkan amanat konstitusi bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan termasuk pendudukan Israel atas Palestina. Wacana tersebut menjadi ramai karena disebarluaskan media. Penelitian ini merupakan

penelitian dengan menggunakan analisa wacana kritis Norman Fairclough. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan *literature review* berita Kompas.id periode Maret 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 terdapat unsur politik yang terkandung dalam wacana penolakan timnas Israel. Ada tiga hasil yaitu ditemukan konstitusi sebagai alasan, politik yang mengintervensi ranah olahraga, dan media yang memberikan konstruksi dalam pemberitaan olahraga ini. Kompas.id menyatakan ini dua ranah yang berbeda, tidak seharusnya dicampuradukkan.

Kata kunci: *Olahraga dan politik, Analisis Wacana Kritis, Piala Dunia U-20, Penolakan Israel.*

1. PENDAHULUAN

Sepak bola adalah cabang olahraga yang paling populer di dunia. Lebih dari 3,5 miliar orang di dunia menggemari sepak bola (World Atlas, 2022). Prestise sepak bola juga dibangun dan dikembangkan melalui pengelolaan yang baik. Maka, didirikanlah federasi sepak bola dunia yang dinamai FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*), pada 21 Mei 1904, di Paris, Prancis. FIFA mempunyai agenda khusus dan terjadwal untuk penyelenggaraan turnamen sepak bola. Berbagai ajang dilaksanakan secara periodik dan diikuti oleh negara-negara yang sudah terdaftar sebagai anggota FIFA.

Salah satu ajang FIFA adalah Piala Dunia U-20. Piala Dunia U-20 adalah penyelenggaraan sepak bola antarnegara yang dilaksanakan dua tahun sekali dan hanya diikuti oleh pemain di bawah usia 20 tahun. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20 untuk tahun 2021. Namun, karena situasi pandemi Covid-19 yang belum membaik sejak tahun 2020, pelaksanaan dimundurkan ke tahun 2023.

Tinggal dua bulan menjelang dimulainya Piala Dunia U-20, timbul berbagai aksi dan protes terhadap penyelenggaraan perhelatan turnamen sepak bola ini. Aksi dan protes tersebut adalah wacana penolakan tim nasional Israel datang dan berlaga di Piala Dunia U-20. Tim nasional Israel sendiri baru lolos setelah tim nasional negara tersebut berhasil mencapai final Piala Eropa U-19 2023.

Protes terhadap keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 bukan karena alasan sepak bola, melainkan terkait tindakan militer Israel ke Palestina. Indonesia memiliki hubungan diplomatik baik dengan Palestina, tetapi tidak resmi dengan Israel. Beberapa tokoh publik Indonesia menolak kehadiran Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 dengan alasan kemanusiaan dan politik. Gubernur Bali, I Wayan Koster, secara resmi mengeluarkan surat penolakan karena menganggap kehadiran Israel bisa memicu masalah keamanan di Bali. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menolak berdasarkan komitmen Bung Karno terhadap Palestina. Penolakan ini menyebabkan pembatalan drawing grup peserta Piala Dunia U-20 yang semestinya dilaksanakan di Bali.

FIFA kemudian secara resmi membatalkan status tuan rumah Indonesia untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 karena polemik terkait penolakan kehadiran timnas Israel di Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada situasi terkini dan penolakan dari tokoh publik Indonesia yang dianggap tidak relevan dengan olahraga. Meskipun Presiden Joko Widodo mengingatkan agar olahraga tidak dicampuri urusan politik, pembatalan status tuan rumah tetap tidak bisa diubah. Keterlibatan para tokoh politik ini patut dipertanyakan karena berpengaruh ke putusan FIFA.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ia menolak Israel bertanding di Piala Dunia U-20 lantaran berkomitmen dengan ajaran Bung Karno yang dengan tegas menentang Israel selama kemerdekaan Palestina belum diberikan oleh Israel. Selain penolakan itu juga dapat ditafsirkan sebagai sikap politik yang tidak lepas situasi kompetisi politik menjelang pilpres, untuk mendapatkan dukungan penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Pernyataan Ganjar ini dilandaskan juga pada ideologi bangsa dan konstitusi. Pernyataan Wayan Koster sedikit berbeda, yang menyatakan bahwa penolakannya terhadap

delegasi Israel di Piala Dunia U-20 karena juga karena faktor keamanan. Bali yang pernah terjadi tragedi Bom Bali I pada tahun 2002 dan kemudian ada peristiwa Bom Bali II pada 2005, selain alasan ideologi dan konstitusi. Koster menyebut Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Intervensi pemerintah dan mencampuradukkan politik di bidang olahraga ini melanggar sportivitas. Olahraga adalah hal yang seharusnya memiliki nilai-nilai sportivitas dengan niat dan tujuan mulia, bertolak belakang dengan politik yang biasanya penuh dengan intrik.

Pembatalan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh media. Oleh media massa, wacana pernyataan pejabat publik tadi menjadi bola liar di masyarakat. Media massa dan juga media sosial menjadi sarana semakin masifnya penolakan tim nasional Israel datang ke Indonesia.

Menurut Bungin (2007:288) media massa memiliki pengaruh terhadap konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial media massa terdapat di dalam putaran suatu informasi yang hadir langsung serta terjadi secara cepat dan luas jangkauannya, sehingga konstruksi sosial terjadi dengan cepat juga dan tersebar secara luas pula. Hal itu dapat membuat sekaligus membentuk suatu opini massa yang baru, massa cenderung condong ke arah apriori dan opini massa condong ke arah sinis.

Di pemahaman menurut Bungin, ada beberapa hal yang penting terkait konstruksi sosial. Pertama, media massa berat sebelah kepada pemilik modal. Kedua, media massa bisa lebih pro terhadap masyarakat. Ketiga, media massa pro terhadap kepentingan publik. Pandangan ini menyoroti bahwa dalam proses merancang objek publikasi berita dan tukar menukar pengaruh antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait suatu berita, terdapat kemungkinan terjadinya pertukaran dana atau barang, yang dapat berdampak pada citra individu yang memberikan mahar atau imbalan terkait pemberitaan itu.

Pengaruh dan kepentingan dalam publikasi berita memang bisa menjadi faktor yang kompleks. Bungin mengungkapkan bahwa adanya pertukaran kepentingan dapat mempengaruhi bagaimana suatu berita dirancang, dipromosikan, dan diinterpretasikan. Bungin juga menyebutkan bahwa ketika pihak-pihak dengan kepentingan tertentu terlibat dalam merancang berita, ada potensi untuk menciptakan "*blow up*" pada citra individu yang memberikan imbalan tersebut. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menjaga integritas dan independensi media dalam menyajikan berita yang objektif dan akurat. Pengaruh keuangan atau kepentingan politik dan bisnis dapat mempengaruhi proses jurnalisme dan menghasilkan distorsi informasi. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk memiliki pemahaman kritis terhadap berita yang mereka konsumsi dan melihatnya dalam konteks yang lebih luas.

Singgungan olahraga dengan politik sendiri tercatat pernah terjadi. Salah satu contoh terjadinya adalah di Jerman pada rentang tahun 1930-an hingga awal 1940-an. Adolf Hitler, pemimpin Jerman saat itu menggunakan tim nasional Jerman sebagai mesin politik untuk membangkitkan semangat bangsanya

yang kala itu sedang lesu karena mengalami krisis ekonomi pada tahun 1930-an. Rakyat Jerman akhirnya bangkit dari keterpurukan itu, berkat strategi penggunaan tim olahraga sebagai bumbu politik kekuasaannya. Contoh lain, penguasa Spanyol, Jenderal Franco, menggunakan tim Real Madrid sebagai alat politiknya. Di era berikutnya, Silvio Berlusconi menggunakan klub sepak bola AC Milan sebagai tunggangan politik, untuk mengembangkan popularitasnya dalam mencapai tujuannya sebagai perdana menteri di Italia. Dari contoh-contoh ini, dapat diketahui bahwa singgungan olahraga dengan politik juga telah terjadi (Junaedi, 2011:266).

Politik, media, dan acara olahraga di Indonesia saling berkaitan dengan situasi politik yang mempengaruhinya. Dari era pasca-kemerdekaan hingga era setelah reformasi, ajang olahraga selalu ada kaitan dengan politik. Di setiap kepemimpinan presiden, ajang olahraga yang berjalan di era presiden tersebut bisa menjadi berbeda tujuan, semisal era presiden Soekarno ajang olahraga sebagai simbol identitas bangsa yang sudah merdeka dan berideologis. Sedangkan pada pemerintahan Soeharto, acara olahraga bisa berdampak pada tujuan pembangunan nasional dan ekonomi (Budiasa, 2022:229).

Terkait wacana penolakan Israel, pernyataan tokoh tersebut tidak selaras dengan presiden, yang seolah justru terkesan mencampurkan hal yang berlainan dan berlawanan. Meski demikian, belum diketahui secara pasti pesan dari wacana-wacana tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Media Massa

Menurut Cangara (2010:123, 126), media adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan isi pesan dari komunikator kepada publik atau khalayak. Sedangkan media massa merupakan sarana penyampaian pesan dari sumber kepada publik, dengan penggunaan media seperti televisi, radio, surat kabar atau koran, majalah, hingga buletin.

Media massa dapat diartikan sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi yang tersebar secara luas dan dapat diakses oleh masyarakat. Media massa berfungsi sebagai alat untuk menyebarluaskan berbagai konten seperti berita, opini, komentar, hiburan, dan sebagainya (Bungin, 2006:72).

Media massa berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan penyiaran informasi, berita, hiburan, dan budaya kepada khalayak yang lebih luas. Media massa berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan informasi dan ide-ide untuk disebar dan dikonsumsi oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, media massa juga memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku dan keputusan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam dunia modern saat ini, media massa memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik. Sebagai contoh, media massa dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang sedang terjadi. Oleh karena itu, media massa sering

dianggap sebagai kekuatan besar dalam kehidupan sosial dan politik sebuah negara.

Media massa memiliki berbagai perspektif. Dalam perspektif politik, media massa menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi. Hal ini karena media massa memberikan arena dan saluran bagi debat politik, menjadikan calon pemimpin politik dikenal secara luas oleh masyarakat (Morissan, 2013:480). Penentuan sikap demokratis atau tidaknya suatu organisasi, masyarakat, atau individu tergantung pada media massa. Keputusan ataupun pembahasan atas berbagai isu sosial yang terjadi sudah harus memperhitungkan peran dari media massa, baik itu untuk tujuan baik, atau juga untuk tujuan sebaliknya.

Media massa memiliki kemampuan untuk menentukan dan menyebarkan pandangan-pandangan yang dinilai lebih dapat diterima masyarakat secara umum (Noelle-Neumann, dalam Morissan, 2013:531-532). Dengan kata lain, mereka yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan pandangan khalayak akan lebih sulit untuk mendapatkan tempat di media massa. Minoritas juga cenderung untuk dijadikan sasaran atau kambing hitam oleh media massa.

Pendapat media terkait isu-isu tertentu juga bisa berbeda dengan pendapat umum di masyarakat. Pandangan media yang diwakili jurnalis ada kalanya bisa bertentangan dengan pendapat individu masing-masing dalam masyarakat. Dengan adanya situasi ini, akan memunculkan dua situasi pendapat. Dua versi realitas akan muncul dan bekerja dalam kondisi demikian, yakni realitas yang disajikan oleh media dan realitas yang dimiliki oleh publik. Masih menurut Noelle-Neumann, hal ini disebut dengan *dual climates of opinion* atau dua iklim pendapat. Di situasi ini, banyak orang yang memilih untuk tetap diam saja. Hal ini terjadi karena faktor pendukung pendapat dominan lebih memiliki keinginan untuk menyatakan pendapatnya dibandingkan dengan pendukung pendapat minoritas.

Hegemoni atas massa juga merupakan konsep penting di dalam media massa. Hegemoni adalah pengaruh, dominasi, dan kekuasaan suatu kelompok sosial tertentu atas kelompok sosial lainnya, yang biasanya lebih lemah atau minoritas (West & Turner, 2007:394-395). Mengenai hegemoni, konsep ini berangkat dari pandangan Antonio Gramsci. Dalam pandangannya, Gramsci memberikan pernyataan bahwa sistem sosial yang selama ini didukung masyarakat justru telah mengeksploitasi diri mereka sendiri, hal ini mulai dari budaya populer hingga agama. Pemikiran tersebut berakar pada gagasan Karl Marx tentang false consciousness atau kesadaran yang salah, di mana individu tidak menyadari akan adanya dominasi di dalam keseharian di kehidupan mereka.

Kelompok elite yang mengontrol hegemoni atas ideologi dalam masyarakat ini bisa terpisah dan terbagi-bagi (Hall, 1986). Hal ini tentu membuat ideologi juga terpecah-pecah menjadi beberapa ideologi yang bertentangan. Berbagai ideologi tersebut bisa mendorong sekaligus menarik publik ke berbagai arah.

Komunikasi dalam media massa mempunyai peran penting dalam mempengaruhi ideologi atau juga budaya populer melalui penyebaran informasi. Media mempunyai kedudukan penting karena secara langsung media massa menyajikan suatu cara memandang realitas. Walaupun demikian, akan ada suara-suara yang menentang sebagai bagian dari perjuangan dialektikal di dalam masyarakat. Di sini, media massa selalu didominasi oleh ideologi yang berlaku atau ideologi yang berkuasa dan media memperlakukan ideologi yang berbeda serta yang berlawanan dalam kerangka ideologi yang dominan, sehingga ideologi berlawanan tersebut dipandang sebagai ideologi pinggiran. Media massa selalu menyatakan diri sebagai media yang menyajikan obyektivitas dan keberagaman, akan tetapi itu hanyalah ilusi semu yang menimbulkan ironi, karena pada faktanya di lapangan media hanyalah instrumen dari ideologi yang dominan (Carrageen, 1993:330-348).

Media massa, terutama media massa online atau daring memiliki tantangan dan perlu kritis dalam mengonsumsi informasi yang diberikan. Seiring dengan perkembangan media, penyebaran berita palsu atau tidak akurat juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Media massa daring telah mengubah lanskap media dan memberikan akses lebih luas terhadap berita dan informasi. Namun demikian, seringkali informasi melalui media daring juga disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya, pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disinformasi dan misinformasi, dan hoaks, serta informasi yang sifatnya adalah ujaran kebencian.

FIFA & Piala Dunia U-20

FIFA (*Federation Internationale de Football Association*) adalah federasi sepak bola internasional yang didirikan pada 21 Mei 1904, di Paris, Prancis. Berdirinya FIFA ini diprakarsai oleh wartawan olahraga, Robert Guerin.

Wewenang dan tugas dari FIFA adalah memajukan sepak bola, memberikan gelar pemain dan pelatih terbaik setiap tahunnya, membuat peringkat negara-negara dunia yang menjadi anggota FIFA secara berkala setiap bulan, dan mengatur transfer antarpemain profesional bagi setiap klub di dunia, serta menyelenggarakan berbagai ajang olahraga.

FIFA membuat kompetisi resmi yang mempertemukan negara-negara di seluruh dunia dalam satu ajang. Ajang itu diberi nama Piala Dunia. Penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali diadakan FIFA di Uruguay pada tahun 1930. Lalu untuk kategori usia, Piala Dunia U-20 dimulai pertama kali pada tahun 2005. Kejuaraan ini diadakan setiap dua tahun sekali dengan tuan rumah secara bergiliran di setiap negara yang mengajukan diri dan melalui proses pemilih oleh FIFA (FIFA.com).

Olahraga, Politik, dan Kaitannya

Olahraga secara umum adalah aktivitas fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan

tujuan meningkatkan kebugaran fisik, mengembangkan keterampilan, dan berpartisipasi dalam kompetisi atau permainan. Pengertian olahraga juga melibatkan aspek kompetitif di mana individu atau tim berpartisipasi dalam kompetisi formal atau informal untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenangkan pertandingan atau mencapai prestasi tertentu. Olahraga juga dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan sosial, belajar nilai-nilai seperti kerjasama dan disiplin, dan mengembangkan keterampilan motorik dan mental. Menurut Edward (1973, dalam Bangun, 2016:159), penjelasan tentang pengertian olahraga adalah bahwa olahraga harus berasal dari konsep bermain, *games*, dan *sport*.

Unsur kompetisi adalah salah satu ciri yang sangat mencolok dalam olahraga, seperti sekarang ini. Saat ini, istilah permainan telah umum digunakan untuk acara olahraga seperti Olimpiade dan Asian Games, hingga dalam lingkup lebih sempit seperti di Asia Tenggara ada SEA Games. Sebagai ajang atau kompetisi, olahraga memberikan kesempatan bagi para atlet untuk berkompetisi dan memperlihatkan kemampuan mereka di depan publik.

Di dalam olahraga, terdapat kewenangan atau hukum khusus yang mengatur diri sendiri yang disebut dengan *lex sportiva*. Kewenangan ini dirumuskan di dalam norma, standar, dan prosedur berupa statuta dan aturan main (*rules of the game*) untuk dipatuhi oleh federasi-federasi anggotanya di setiap negara. Di dalam sepak bola, FIFA memiliki Statuta FIFA, yang wajib diikuti oleh setiap negara anggota, termasuk Indonesia di dalamnya, dalam hal ini PSSI harus tunduk terhadap aturan FIFA.

Untuk pengertian politik, Anthony Downs (1957) menjelaskan politik adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dalam situasi di mana terdapat konflik kepentingan di antara individu atau kelompok. Sedangkan Max Weber (1919) memberikan makna bahwa politik adalah usaha yang berhasil atau gagal untuk memperoleh kekuasaan atau mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik di dalam masyarakat atau di antara negara-negara.

Budiardjo (2003:8), mendefinisikan politik (*politics*) adalah berbagai macam kegiatan di dalam suatu sistem politik atau negara. Kegiatan itu menyangkut berbagai proses menentukan tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan yang hendak dicapai itu, yaitu membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan harmonis (Budiardjo, 2010:15). Untuk mencapai tujuan, diperlukan suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut tentang pengaturan serta pembagian dari sumber-sumber yang sudah ada. Kemudian, untuk melaksanakan kebijakan tersebut, juga diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) untuk membina kerja sama dalam pelaksanaannya, serta untuk menyelesaikan konflik, karena dalam pelaksanaan juga akan ada masalah-masalah di dalamnya.

Politik selalu berkaitan dengan tujuan-tujuan seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan atas kepentingan pribadi seseorang (*private goals*). Di dalam politik itu sendiri juga menyangkut

berbagai kegiatan banyak kelompok, termasuk partai politik serta kegiatan dari individu di dalamnya.

Olahraga dan politik adalah dua hal yang berbeda. Kedua hal ini bisa dibidang juga bertolak belakang. Olahraga menjunjung tinggi sportivitas, sedangkan sebaliknya politik adalah hal yang bisa menggunakan intrik. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk meraih kemenangan, tetapi berbeda cara memperolehnya. Dalam olahraga, meraih kemenangan bisa dengan meningkatkan kualitas diri serta bisa dengan kerja sama, berbeda dengan politik, kemenangan bisa dengan cara menjatuhkan lawannya. Di dalam dunia olahraga, terdapat *lex sportiva* yang merupakan norma dan aturan serta statuta yang menjadi pedoman dari olahraga, yang tidak bisa dicampuri oleh elemen lain, apalagi politik.

Menurut Sugden (2002:390), ada konsep "*politics of sports*" dalam irisan olahraga dengan politik. *Politics of sports* adalah konsep yang digunakan untuk memahami keterkaitan antara olahraga dan politik. Konsep ini mengacu pada dua hal, yaitu politisasi olahraga dan olahragisasi politik. *Pertama*, politisasi olahraga mengacu pada bagaimana kepentingan politik mempengaruhi praktik olahraga, baik dalam hal organisasi olahraga, pembiayaan, pengaturan, dan juga kebijakan terkait olahraga. Misalnya, keputusan pemerintah untuk mendanai pembangunan stadion atau mempromosikan olahraga tertentu dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. *Kedua*, olahragisasi politik mengacu pada bagaimana olahraga dapat menjadi arena politik yang penting, di mana peserta atau penonton dapat mengekspresikan pandangan politik mereka. Misalnya, tindakan protes atau tindakan politik lainnya yang dilakukan oleh atlet atau penonton di arena olahraga.

Konsep "*politics of sports*" ini penting untuk dapat memahami keterkaitan antara olahraga dengan politik, karena dapat memberikan kerangka teoritis dan metodologis yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena politik yang terjadi dalam penyelenggaraan ajang olahraga. Sugden mengajukan beberapa isu teoritis dan metodologis yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hubungan antara olahraga dan politik.

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga. Sepak bola sendiri saat ini merupakan sebuah fenomena budaya yang telah memasuki wilayah politik. Sepak bola menjadi sebuah alat yang dapat digunakan untuk membentuk identitas dan citra bangsa, serta dapat mempengaruhi arus politik di suatu negara. Sepak bola juga dapat mempengaruhi isu-isu politik dalam sebuah negara, seperti isu-isu ras, diskriminasi, dan kebijakan imigrasi. Contohnya, keikutsertaan para pemain sepak bola asing dalam sebuah klub dapat memicu polemik di kalangan masyarakat terkait kebijakan imigrasi. Selain itu, sepak bola juga dapat digunakan sebagai sarana diplomasi dan hubungan internasional antara negara-negara (Junaedi, 2018).

Sepak bola dalam komunikasi politik telah berkembang menjadi *free media* yang diminati oleh para aktor politik untuk meraih dukungan publik secara lebih "hidup" dan juga menjadi isu yang diangkat dalam beberapa iklan politik (Junaedi, 2010:1, dalam Budianto, 2011).

Sepak bola telah menjadi sebuah media yang diminati oleh para aktor politik untuk mencapai

dukungan publik secara lebih mudah dan efektif. Di banyak negara, olahraga khususnya sepak bola menjadi topik yang sering dibicarakan di kalangan masyarakat dan menjadi topik pembicaraan sehari-hari.

Hal ini dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk memperkenalkan citra mereka dan membangun hubungan dengan masyarakat melalui olahraga sepak bola. Para politisi seringkali memanfaatkan kehadiran mereka di stadion sepak bola untuk memberikan pidato politik dan menunjukkan dukungan mereka pada tim nasional.

Iklan politik yang menampilkan olahraga sepak bola, baik dalam bentuk dukungan pada tim nasional atau program olahraga, seringkali digunakan oleh para kandidat politik untuk menarik perhatian masyarakat dan memperkuat citra mereka.

Penggunaan olahraga, termasuk sepak bola, dalam politik juga dapat menimbulkan konflik dan memecah belah masyarakat. Hal ini terjadi ketika para aktor politik memanfaatkan sepak bola sebagai alat untuk memperkuat dukungan kelompok tertentu dan meremehkan kelompok lain, terutama ketika tim nasional sepak bola diidentifikasi dengan kelompok etnis atau agama tertentu.

Pada hakikatnya, olahraga dan politik merupakan dua ranah yang berbeda. Namun, pada sejarahnya keduanya memiliki relasi yang sangat kuat. Jika merujuk pada sejarah, bisa dilihat dan disimpulkan bahwa olahraga (juga sepak bola) biasa dijadikan sebagai media komunikasi politik oleh berbagai pihak. Pihak yang berkuasa (*status quo*) menjadikan olahraga dan sepak bola menjadi media untuk dapat memperkuat hegemoninya, sedangkan pihak oposisi bisa juga membuat olahraga dan sepak bola sebagai media komunikasi politik sebagai bentuk suara perlawanan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, ada beberapa yang bisa dipakai, salah satunya pemanfaatan dokumen (Moleong 2006:5, dalam Syarief, 2017). Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan metode *literature review* terhadap berita-berita dari media daring Kompas.id selama periode Maret 2023.

Penulis menggunakan pendekatan Analisa Wacana Kritis untuk meneliti dan memperoleh hasil dalam penelitian yang dilakukan ini. Di sini, penulis bersikap kritis dalam melakukan analisa dan penelitian terhadap teks atau wacana yang hendak dianalisa. Analisa wacana kritis (*critical discourse analysis*) adalah suatu pendekatan analisa teks yang mencoba untuk mengidentifikasi dan memahami ideologi, kekuasaan, dan hubungan sosial yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa dalam teks. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk dan mempengaruhi pemikiran, tindakan, dan pandangan dunia.

Metode ini digunakan untuk membedah atau membongkar pesan atau makna dari suatu komunikasi yang terdapat di dalam suatu teks atau wacana, baik itu secara tekstual maupun kontekstual (Pawito, 2007:17). Makna yang digali dari sebuah teks atau pun pesan dalam komunikasi tidak saja dilihat dari teks yang sudah tertulis.

Norman Fairclough (1984) mengemukakan bahwa analisa wacana kritis adalah konsep yang menggabungkan antara teori linguistik dan teori sosial yang dipinjam dari gagasan-gagasan para pemikir seperti Marx, Gramsci, Althusser, Habermas, Foucault dan Bourdieu. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa bahasa tidak bisa dilepaskan dari ideologi, relasi kuasa, dan dimensi historis. Kuasa adalah sesuatu yang implisit dalam praktik sosial sehari-hari. Dalam keseharian, bahasa ini dipakai untuk membentuk dan melanggengkan kekuasaan.

Fairclough (dalam Eriyanto, 2002:286) membagi analisa wacana kritis menjadi tiga bagian dimensi, yaitu *text* (analisa teks) yang menganalisa teks secara linguistik atau kebahasaan, melihat kosakata, semantik dan struktur kalimat; *discourse practice* (praktik diskursif) yang berfokus pada penciptaan atau produksi dan konsumsi teks; dan *sociocultural practice* (praktik sosio-kultural) meliputi situasional, institusional serta sosial, didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial di luar media memengaruhi bagaimana wacana muncul di media.

Beberapa langkah dalam analisa wacana kritis meliputi:

2. Identifikasi teks yang akan dianalisa.
3. Analisa struktur teks, seperti sintaksis, kosakata, dan retorika.
4. Identifikasi makna literal dan konotatif kata-kata dalam teks.
5. Identifikasi asumsi, nilai, dan keyakinan yang mendasari teks tersebut.
6. Identifikasi dan kritik terhadap kekuasaan dan ideologi yang terkandung dalam teks, serta dampaknya pada masyarakat.

Eriyanto (2002), menjelaskan bahwa ada tiga hal utama yang ada kaitannya dengan wacana, yakni teks, konteks, dan wacana.

Dalam penelitian, data adalah perangkat yang penting. Untuk menganalisa dan mendapat hasil penelitian, diperlukan pengumpulan data-data terkait penelitian tersebut. Di penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan metode Literature Review. Dengan menggunakan metode literature review, penulis memperoleh data-data dari berbagai sumber berupa penelitian terdahulu yang sudah ada dan tentu terkait dengan penelitian ini, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan teori dan topik pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi dan Olahraga di Indonesia

Kompas.id melalui berita-beritanya, seperti yang berjudul “*PDI-P Buka Suara Soal Alasan Kadernya*

:

Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20”, “*Polemik Kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Indonesia Menguat*”, dan “*Bali Tidak Menolak Piala Dunia U-20, tetapi Menolak Tim Israel*” menjelaskan kronologi dan alasan penolakan kehadiran tim nasional Israel di Indonesia dalam Piala Dunia U-20. Alasan penolakan tersebut adalah berdasarkan perspektif ideologis dan konstitusional bangsa dan negara, bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa.

Dalam berita tersebut, terdapat intervensi dari partai politik melalui tokoh kader partainya, yaitu Ganjar Pranowo dan Wayan Koster, yang membahas wacana penolakan Israel dari sudut pandang ideologis dan konstitusi, bukan hanya dalam konteks olahraga.

Praktik diskursif yang digunakan oleh redaksi dalam produksi salah satu berita bersifat institusional dengan mengaitkan pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, untuk mendapatkan alasan mengapa ada wacana penolakan Israel. Awalnya, wacana tersebut tidak disebutkan sebagai perintah dari partai, dan Ganjar Pranowo juga membantah bahwa ia diperintah oleh partai untuk membuat wacana tersebut.

Dihubungkan dengan sisi historis dan praktik sosio-kulturalnya, penolakan mengacu pada ideologi dan konstitusi yang telah ada sejak era presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ideologi tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dalam konteks Palestina dan Israel, Indonesia telah lama mendukung Palestina dan menyuarakan kebebasannya di PBB dengan dukungan dari ideologi dan konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Indonesia juga telah memberikan komitmen untuk membantu penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel.

Di berita lain yang berjudul “*Polemik Kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Indonesia Menguat*”, Kompas.id menyoroti lebih dalam wacana penolakan tim nasional Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Redaksi Kompas.id menggunakan judul mencolok dengan kata “menguat” untuk menunjukkan bahwa polemik penolakan tersebut sudah ada sejak sebelum pernyataan resmi dari Gubernur Bali, Wayan Koster. Berita ini menekankan bahwa penolakan Israel berdasarkan pertimbangan politik dan kebijakan pemerintah masing-masing negara, serta berfokus pada alasan konstitusional dan ideologis.

Dalam dimensi praktik diskursif, berita tersebut langsung menyampaikan informasi tentang wacana penolakan Israel tanpa menyebutkan secara langsung nama tokoh yang menolak dalam judulnya. Redaksi berusaha untuk memberitahu kepada masyarakat tentang adanya penolakan tanpa menyalahkan salah satu pihak secara eksplisit.

Dalam berita berjudul "*Bali Tidak Menolak Piala Dunia U-20, tetapi Menolak Tim Israel*" membahas lebih lanjut alasan konstitusi dan juga alasan keamanan terkait penolakan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20. Berita ini mengungkapkan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan politik, konflik Israel-Palestina, nilai-nilai kemanusiaan, dan keselamatan masyarakat. Penolakan ini juga mencerminkan dukungan solidaritas terhadap Palestina dan konsistensi Indonesia dalam menolak hubungan diplomatik dengan Israel selama masih ada konflik dengan Palestina.

Media juga menyebutkan konteks sosial traumatis di Bali setelah peristiwa terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II, yang turut mempengaruhi keputusan Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk menolak kehadiran tim Israel demi menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat.

Secara keseluruhan, analisa berita-berita Kompas.id menunjukkan bahwa penolakan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia didasarkan pada pertimbangan politik, konstitusi, ideologi, kemanusiaan, hingga faktor keamanan. Hal ini juga mencerminkan dukungan terhadap Palestina dan konsistensi Indonesia dalam menolak hubungan diplomatik dengan Israel.

Olahraga dan Politik

Dengan menggunakan analisa wacana kritis, terlihat jelas bagaimana olahraga dengan politik bersinggungan dalam ajang Piala Dunia U-20 2023. Hal tersebut didapatkan dengan menganalisa berita-berita Kompas.id, yaitu yang berjudul "*Polemik Timnas Israel, Jokowi Minta Olahraga Tak Dicampur Aduk dengan Politik*", "*Gagalnya Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Bakal Berdampak ke Pemilu 2024?*", "*Indonesia Pernah Dua Kali Tolak Keikutsertaan Israel di Ajang Olahraga*", dan "*Jangan Campuradukkan Olahraga dan Politik*".

Media menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya memisahkan urusan olahraga dan politik terkait polemik keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Jokowi meminta agar dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak dipengaruhi oleh partisipasi Israel dalam ajang olahraga tersebut. Otoritas atau kuasa Jokowi sebagai presiden terlihat dalam menyampaikan pandangannya dan mengungkapkan upayanya untuk mencari solusi tanpa memperumit masalah baru. Pemilihan kata-kata seperti "minta" dan "meminta" dalam salah satu berita menunjukkan pengaruh otoritasnya. Media juga mencerminkan pandangan bahwa olahraga harus dipisahkan dari isu politik dan ideologi yang lebih kompleks.

Indonesia telah fokus dan serius dalam membantu Palestina serta mendukung perjuangan mereka, menjadikan Indonesia sebagai teladan bagi negara-negara Islam dalam memberikan dukungan dan solidaritas terhadap Palestina. Presiden Jokowi secara konsisten mendukung Palestina dan menegaskan bahwa politik dan olahraga harus dipisahkan, sehingga menerima timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 tidak berarti berhenti mendukung Palestina.

Media Kompas.id selanjutnya menunjukkan nuansa politik yang kental dalam ajang olahraga ini, dan

mempertanyakan apakah kegagalan ini akan berdampak pada Pemilu 2024. Berita yang dibuat oleh redaksi Kompas.id akan wacana pengaruh kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 terhadap Pemilu 2024 menggunakan pemilihan kata yang dramatis untuk menarik perhatian pembaca dan menciptakan kesan negatif terkait kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah.

Kompas.id menyampaikan wacana bahwa kegagalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan hal politis yaitu terhadap Pemilu 2024. Namun, dampaknya pada pemilu di Pemilu 2024 diragukan, karena isu ini akan tertutup oleh isu-isu lain dan masyarakat Indonesia yang disebut memiliki memori yang pendek.

Sepak bola sendiri dianggap sebagai alat politik yang efektif dan dapat digunakan oleh politisi untuk kampanye politik. Ganjar Pranowo dan Wayan Koster, sebagai kader partai PDI Perjuangan, menggunakan penolakan timnas Israel sebagai platform untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan memperkuat citra diri dan partai sebagai pelindung kepentingan nasional.

Dalam konteks *politics of sports* atau politisasi olahraga (Sugden, 2002:390), penolakan Israel dalam Piala Dunia U-20 dapat menjadi propaganda untuk menyampaikan pesan politik pemerintah dan kelompok politik kepada masyarakat. Gerakan penolakan ini juga bisa dilihat sebagai perjuangan hak asasi manusia dan perubahan sosial, yang menggunakan olahraga sebagai sarana untuk menggalang dukungan dan memperjuangkan perubahan.

Penolakan terhadap Israel sendiri tidak hanya terjadi sekali ini, tetapi sudah dua kali terjadi yang dilakukan oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dua penolakan sebelumnya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap keikutsertaan Israel juga terjadi dalam ajang olahraga, yaitu di ajang Asian Games 1962 dan kualifikasi Piala Dunia Swedia 1958.

Media menyoroti sikap politik Indonesia di masa lalu dan bagaimana olahraga, khususnya sepak bola, dapat dipengaruhi oleh politik. Penolakan Israel dalam ajang olahraga terkait erat dengan sikap politik Indonesia saat itu. Pada tahun 1957, penolakan tersebut dilakukan karena khawatir kehilangan dukungan negara-negara Arab penting dalam sidang Umum PBB terkait masalah Irian Barat (Siswanto, 2020:2). Sementara pada Asian Games 1962, penolakan terhadap Israel dan Taiwan terkait dengan perjuangan melawan kolonialisme Israel dan hubungan erat dengan Republik Rakyat China.

Penolakan Israel pada ajang olahraga berpengaruh besar di dalam hubungan internasional Indonesia. Usai penolakan Israel di Asian Games 1962 itu, Indonesia mendapatkan sanksi dari IOC yang melarang Indonesia tampil di Olimpiade Tokyo 1964. Hal ini memunculkan ide Soekarno untuk mengadakan Ganefo sebagai ajang olahraga tandingan.

Sejarah penolakan Israel oleh Indonesia menunjukkan bahwa olahraga dan politik di Indonesia tidak terpisahkan, dan pemimpin seperti Soekarno menggunakan ajang olahraga untuk memperkuat sentimen

kebangsaan dan nasionalisme serta memperluas pengaruh Indonesia ke dunia luar sebagai negara baru dunia ketiga (Huebner, 2016:175).

Sepak bola dan politik adalah dua hal yang harus dipisahkan. Media Kompas.id secara jelas menegaskan itu melalui berita pernyataan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya memisahkan urusan olahraga dan politik terkait polemik keikutsertaan tim nasional Israel di Piala Dunia U-20 2023.

Presiden Jokowi menggunakan bahasa untuk menekankan pentingnya memisahkan olahraga dan politik serta mengacu pada aturan FIFA untuk menjaga integritas olahraga dan menghindari konflik. Hubungan antara sepak bola dan politik terkait konteks sosial, politik, dan budaya sendiri termasuk hubungan yang kompleks. Polemik keikutsertaan timnas Israel terkait dengan konflik Israel-Palestina, yang mempengaruhi interpretasi dan respons terhadap isu tersebut.

Meskipun sepak bola dan politik seharusnya dipisahkan, sejarah menunjukkan bahwa kadang-kadang keduanya bisa bertemu dan bersinggungan. Dalam beberapa contoh, olahraga digunakan sebagai alat komunikasi politik atau memperkuat hegemoni, seperti kasus Silvio Berlusconi yang menggunakan klub sepak bola AC Milan untuk komunikasi politiknya dan menarik massa dalam mencapai tujuannya menjadi perdana menteri Italia. Ada Roman Abramovich dengan klub Chelsea yang terkait dengan alasan politis serta bisnis dari pemerintah Rusia (Junaedi, 2011:9, dalam Budianto, 2019).

Dalam konteks penolakan tim nasional Israel, hal ini dapat dilihat sebagai ekspresi perlawanan dan juga sebagai strategi untuk memperkuat posisi politik bagi beberapa tokoh, seperti Wayan Koster dan Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah, dan secara khusus Ganjar Pranowo yang menjadi calon presiden untuk Pemilu 2024. Namun, penolakan timnas Israel ini juga menunjukkan bahwa olahraga bisa menjadi sarana untuk menyuarakan perlawanan dan menyampaikan pesan politik.

Media dan Pemberitaannya

Media memiliki ideologi tersendiri dalam pemberitaannya. Ideologi media ini menjadi penting karena menjadi salah satu faktor yang bisa memberi pengaruh kepada pemberitaan yang diberitakan media itu terhadap suatu peristiwa yang berkaitan dan berhubungan dengan media itu (Reese, 2019, dalam Muthaqin 2021:64). Iskandar (2018:57), menemukan bahwa media Kompas adalah media yang mengedepankan humanisme serta bersifat plural. Hal ini akan memengaruhi setiap pemberitaan dari segi teks, praktik diskursif, hingga sosio-kultural.

Dari sisi media dan pemberitaan, ada beberapa berita Kompas.id yang dianalisa, yaitu berita berjudul *“Polemik Israel Jadi Pertaruhan Citra Indonesia”*, *“Terkait Polemik Israel, Indonesia Mengingkari Komitmennya ke FIFA”*, dan *“Perlu Matang sebagai Bangsa”*.

Pada awalnya, wacana penolakan Israel berpartisipasi di ajang Piala Dunia U-20 2023 muncul dari kelompok-kelompok masyarakat berbasis agama, namun kemudian menarik perhatian partai dan tokoh publik sehingga media mulai memberitakannya.

:

Sisi praktik diskursif dan sosiokultural Kompas.id dalam memproduksi berita adalah memuat pernyataan dari narasumber yang pro sekaligus kontra terhadap penolakan Israel. Pernyataan narasumber dari bidang olahraga mengarah pada penolakan berdasarkan regulasi olahraga, sementara pengamat budaya sepak bola memberikan saran untuk mencapai solusi yang mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, dan olahraga. Pemilihan judul dan pemilihan foto dalam oleh media Kompas.id juga mempengaruhi persepsi pembaca terhadap wacana tersebut.

Berita dari Kompas.id berjudul "*Terkait Polemik Israel, Indonesia Mengingkari Komitmennya ke FIFA*" memberikan analisa tentang hubungan antara olahraga dan politik dalam konteks pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

Konstruksi makna ditemukan dalam pemberitaan oleh media. Di media Kompas.id, terdapat konstruksi makna terhadap pembaca yang menyalahkan Indonesia melalui judul dan teks berita. Meskipun Kompas.id tidak menyalahkan pihak tertentu secara langsung, tetapi dalam beritanya berusaha memihak kepada kepentingan rakyat.

Narasumber yang dipilih redaksi untuk membantu mempertegas fakta berita dan memberikan solusi terhadap polemik yang ada, tidak hanya sekadar menyatakan salah saja tetapi juga memberikan saran solusi. Melalui berita "*Terkait Polemik Israel, Indonesia Mengingkari Komitmennya ke FIFA*", ada penggunaan kata majas "di ujung tanduk" menandakan ketakutan bahwa turnamen akan gagal dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan media memengaruhi pembaca akan adanya sesuatu yang perlu ditakutkan.

Penggunaan kuasa yang dipakai dalam ajang sepak bola ini juga disoroti media, seperti pengaruh para gubernur dalam penolakan Israel. Secara keseluruhan, media Kompas.id memberikan konstruksi makna pada pembaca untuk memahami hubungan antara olahraga dan politik dalam konteks pembatalan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

Penelitian ini juga menemukan perspektif dari sisi redaksional melalui tulisan tajuk rencana Kompas.id. Media daring Kompas.id menyoroti keterkaitan antara olahraga dan politik, serta pentingnya kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan acara olahraga dunia. Penolakan tim Israel oleh gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan gubernur Bali, I Wayan Koster, menimbulkan pertanyaan mengenai sportivitas dan politisasi olahraga. Kompas.id juga menekankan adanya aturan dan tata kelola yang jelas dalam olahraga internasional. Hal itu terlihat dari hasil analisa berita tajuk rencana yang berjudul "*Perlu Matang sebagai Bangsa*".

Dalam analisa, terlihat penggunaan kata-kata dan frasa yang menekankan urgensi dan kepentingan, serta adanya keterkaitan relasi kuasa dengan ideologi amanat Bung Karno yang mempengaruhi penulisan berita. Media Kompas.id berusaha netral tetapi tampak condong kepada pandangan yang sejalan dengan

ideologi medianya. Meskipun demikian, media ini juga berusaha melawan hoaks atau berita palsu berdasarkan ideologi serta visi dan misi jurnalisannya serta memberikan pandangan dari ahli olahraga untuk memberikan kejelasan dan pandangan baru serta perspektif lain kepada pembacanya.

KESIMPULAN

Dalam penelitian yang menggunakan analisa wacana kritis Norman Fairclough terhadap berita-berita Kompas.id, penulis mendapatkan temuan yang saling berkaitan dalam tiga dimensi analisa wacana kritis itu, yaitu dalam dimensi teks, dimensi praktik diskursif, dan praktik sosio-kultural.

Pertama, konstitusi menjadi alasan dan dasar kuat dalam wacana penolakan tim nasional Israel hadir di Indonesia. Terdapat alasan konstitusi serta ideologi bangsa dan negara Indonesia berupa amanat yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk menentang segala jenis penjajahan, termasuk pendudukan Israel di wilayah Palestina dan segala bentuk kekerasannya.

Kedua, hal konstitusional itu membawa ke ranah lainnya, yaitu ranah politik. Dapat diambil kesimpulan bahwa kaitan politik dengan olahraga sangat jelas di penyelenggaraan ajang Piala Dunia U-20 2023. Wacana penolakan tim nasional Israel oleh gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan gubernur Bali, I Wayan Koster, menjadi jelas bahwa hal itu adalah urusan politik yang mengintervensi ranah sepak bola dan olahraga setelah dianalisa dengan wacana kritis dan mengaitkan dengan konteks secara luas. Terutama dikaitkan dengan situasi kompetisi politik menjelang Pilpres, diharapkan penolakan tersebut mendapatkan dukungan politis, dari penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim.

Ketiga, media memiliki peranan penting dalam wacana penolakan timnas Israel. Kompas.id terlihat sebagai media yang ikut meramalkan wacana. Media Kompas.id menunjukkan sikap redaksi yang merepresentasikan kekecewaan masyarakat Indonesia akibat kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 melalui judul berita dan setiap teks yang ditampilkan, sekaligus menjadi media yang solutif, serta media yang tidak langsung menjustifikasi dan menyalahkan pihak tertentu, sehingga bisa dibilang media ini adalah netral yang berpihak kepada kepentingan publik. Kompas.id memiliki relasi kuasa dengan wacana meski tidak secara langsung, sebagai media dengan nama yang diberikan oleh Bung Karno, kemudian sekarang di beritanya media ini terlihat tidak secara langsung menyalahkan pihak yang membawa nama dan amanat Bung Karno sebagai alasan penolakan Israel. Meski mengedepankan jurnalisme berkualitas dan netral serta anti terhadap hoaks dan menjunjung humanisme dan pluralisme, media ini terlihat tetap memiliki relasi kuasa dengan Bung Karno dengan terlihat seperti memihak kepada tokoh yang berlandaskan pada amanat Bung Karno, meski juga mengkritisi bahwa bangsa Indonesia kurang matang sebagai bangsa, dalam artian mencampuradukkan olahraga dengan politik.

Kaitan olahraga dan politik jelas terlihat setelah dianalisa dan menghubungkan dengan konteks. Namun, politik dan olahraga tidak bisa disatukan karena dua hal itu adalah ranah yang berbeda. Tetapi secara historis, ditemukan fakta bahwa kedua hal berbeda ini nyaris selalu bersinggungan, baik di masa

:

lampau maupun secara aktual, di negara lain maupun di Indonesia. Secara khusus di Indonesia, bahkan sebelumnya sudah terjadi kasus serupa yang juga menolak Israel dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 1958 dan Asian Games 1962, juga dengan alasan politis.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Sabaruddin Yunis. 2016. *Peran Pendidikan Jasmani dan Olahraga pada Lembaga Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Publikasi Pendidikan Vol. VI (3) 156-167.
- Budianto, Heri. 2019. *Kontestasi Politik dalam Ruang Media: Perspektif Critical Discourse Analysis*. Jakarta: Prenada Media.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiasa, Meistra. 2022. *Politics, Media, and Sports in Indonesia*. Annual International Conference on Social Science and Humanities.
- Bungin, Burhan. 2007. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cangara, Hafied. 2019. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Carragee, Kevin M. 1993. *A Critical Evaluation of Debates Examining the Media Hegemony Thesis*. Western Journal of Communication, Vol. 57 (3) 330-348.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hall, Stuart. 1986. *The Problem of Ideology-Marxism without Guarantees*. Journal of Communication Inquiry Vol. 10 (2) 28-44.
- Huebner, S. 2016. *Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia 1913-1974*. Singapore: NUS Press.
- Junaedi, Fajar. 2018. *Sepak Bola dan Politik: Telaah atas Pengaruh Sepak Bola dalam Berbagai Konteks Politik*. Jurnal Dinamika Global, Vol. 3 (2) 111-122.
- McNair, B. 2007. *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muthaqin, Farid, dkk. 2021. *Ideologi Media dan Framing pada Pemberitaan Perusakan Rumah Ibadah di Kompas dan Republika*. Jurnal Peurawi No. 4 (2) 63-82.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Reese, S. D. 2019. *Hierarchy of Influences*. The International Encyclopedia of Journalism Studies.
- Siswanto. 2020. *Indonesia dan Diplomasi Irian Barat 1949–1962: Memanfaatkan Perang Dingin*. Jakarta: LIPI Press.
- Sugden, J. 2002. *Sport and Politics: Theoretical and Methodological Issues*. Journal of Sport & Social, Vol. 26 (4) 373-390.
- Veroutsos, Eleni. 2022. *The Most Popular Sports In The World*. Diakses 31 Maret 2023 dari worldatlas.com.
- West, Richard & Lynn Turner. 2007. *Introducing Communication Theory*. McGraw-Hill Higher Education.